

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara

Dewi Mahrani Rangkyt^{a*}, Mohammad Yusuf^a, Rothsalina Agustia Pasaribu^a

^aEkonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi

***Korespondensi:** dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id

Info Artikel

Diterima:

15 Desember 2021

Disetujui:

2 April 2022

Terbit daring:

4 Mei 2022

DOI: -

Sitasi:

Rangkyt, D. M., Yusuf, M. & Pasaribu, R. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 41-52.

Abstract

The study aims to test the influence of local native income, balanced funds, and regional spending on the human development index. The method used is multiple linear analysis. This type of quantitative research uses secondary data on local government financial statements that have been audited by the CPC and statistical data from www.bps.go.id. The study sample criteria cover all 33 Regencies / Cities of North Sumatra in 2018-2019 with SPSS version 20. The results showed that the original income of the region, the balance fund affected the human development index. In comparison, regional spending did not significantly affect the human development index. Simultaneously the original income of the region, balanced funds, and provincial spending are jointly influential on the human development index of North Sumatra province. Every government in North Sumatra province is expected to increase investment in the physical form further so that fixed assets increase every year. With increased means, it can support the economic welfare of the community.

Keywords: Balance Fund; Human Development Index; Income; Regional Spending

Abstrak

Penelitian bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah analisis linear berganda. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan data statistik dari www.bps.go.id. Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2018-2019 dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Sumatera Utara. Setiap pemerintah di provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap tiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Belanja Daerah; Dana Perimbangan; Indeks Pembangunan Manusia; Pendapatan Asli Daerah

Kode Klasifikasi JEL: O15; R58; R11

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (BPPRD, 2022) yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain. Agar hal ini dapat dicapai tentunya harus dilakukan langkah-langkah yang ditindak lanjuti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup penting (Kemenkeu DJPK, 2014) dalam untuk melakukan aktivitas pemerintahan, menentukan kemampuan daerah dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

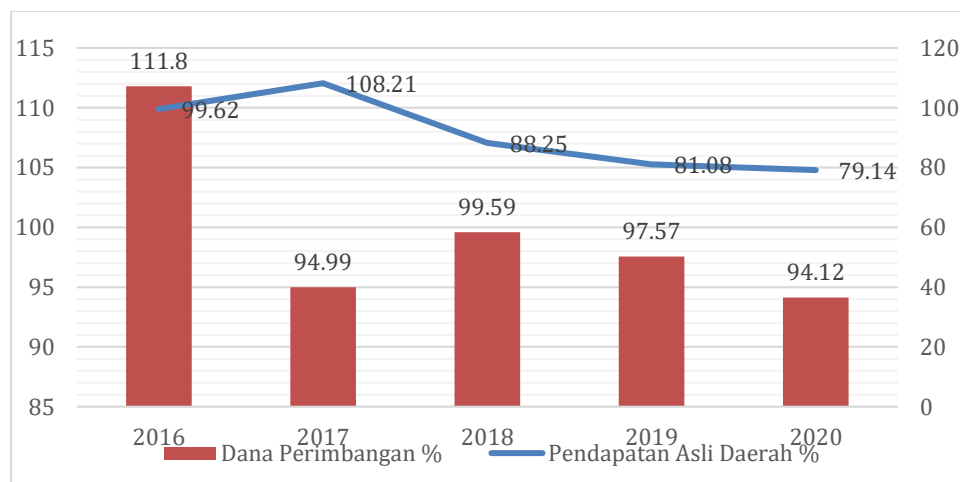
Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif lebih rendah (Nasir, 2019) terhadap total penerimaan daerah. Namun, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari instansi lebih tinggi atau pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang masih sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kegiatan pembiayaan pembangunan daerah ini digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dan diharapkan dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan kata lain, pemerintah daerah dimotivasi agar meningkatkan kemampuan, potensinya seoptimal mungkin dalam membelanjakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Rawung, 2016) yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan juga sebagai kontribusi terbesar diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar pemerintahan dapat mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk mengelola otonom daerah.

Pada umumnya kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bersumber dari APBD, demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana Pendapatan Asli Daerah (Reza, 2018) untuk jangka panjang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara agar dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Namun sejauh ini peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan cukup baik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Ringkasan Laporan Realisasi dibawah ini dalam 5 (lima) Tahun kebelakang.

Gambar di bawah memberikan potret rasio Pendapatan Asli Daerah (Simbolon & Elviani, 2017) dan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan seluruh pemda yang dikelompokkan pada masing-masing Provinsi di Indonesia. Menggambarkan secara agregat (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Sumatera Utara sendiri rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah total pendapatan hanya mencapai 20% dan rata-rata rasio dana perimbangan atau dana transfer mencapai 80%.

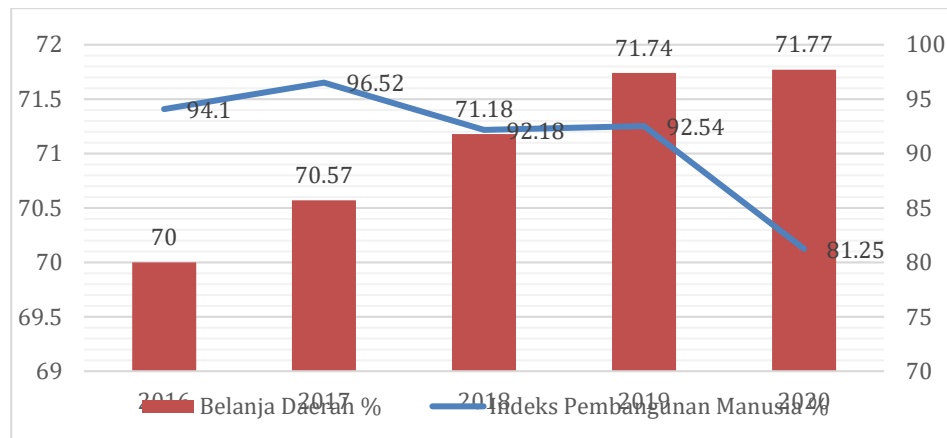
Realisasi anggaran pendapatan asli daerah (Dalimunthe, 2017) yang menurun menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pendapatan asli daerah yang rendah sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah karena menurunnya jumlah uang kas daerah dalam rangka merealisasikan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1. Persentase Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 s/d 2020

Sumber: (BPS, 2021)

Dana Perimbangan yang di peroleh dari pusat melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan lainnya. Besarnya pembagian anggaran yang dialokasikan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini menggambarkan bahwasannya masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat yang dapat dilihat dari dana perimbangan yang diperoleh. Tentunya tujuan dari pengalokasian dana terbit yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara (BPPRD, 2022). Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai hal yang penting pada proses perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengamati kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli.



Gambar 2. Persentase Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 s/d 2020

Sumber: (BPS, 2021)

Pembangunan manusia (Rahman, 2016) menjadi tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan pembuatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam prioritas pembangunan yang dibutuhkan. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*).

Beberapa daerah di Sumatera Utara masih tertinggal baik dari segi akses pendidikan, kesehatan sehingga indikator harapan hidup yang tidak berimbang diantara beberapa kota dan kabupaten. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah daerah yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara merata sesuai amanat undang-undang otonomi daerah. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu Tingkat Kemandirian Daerah.

Adapun menurunnya realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa daerah tidak mampu menyerap anggaran dalam rangka merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga proses pembangunan yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara terhambat.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan kemampuan melaksanakan ekonomi sendiri. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat

meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan daerah tersebut. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berisi tentang “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”. Menurut (Mahmudi, 2010). Dari definisi diatas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sendiri agar terciptanya tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan tingkat kemandirian yang baik.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Belanja Daerah

Anggaran menyangkut rencana kegiatan baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan maka diperlukan rencana keuangan yang akan dijalankan pada masa mendatang (biasanya satu tahun). Rencana keuangan ini disebut anggaran negara (APBN). Anggaran pendapatan dan belanja itu disusun setiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disegala bidang. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. (Darise, 2011).

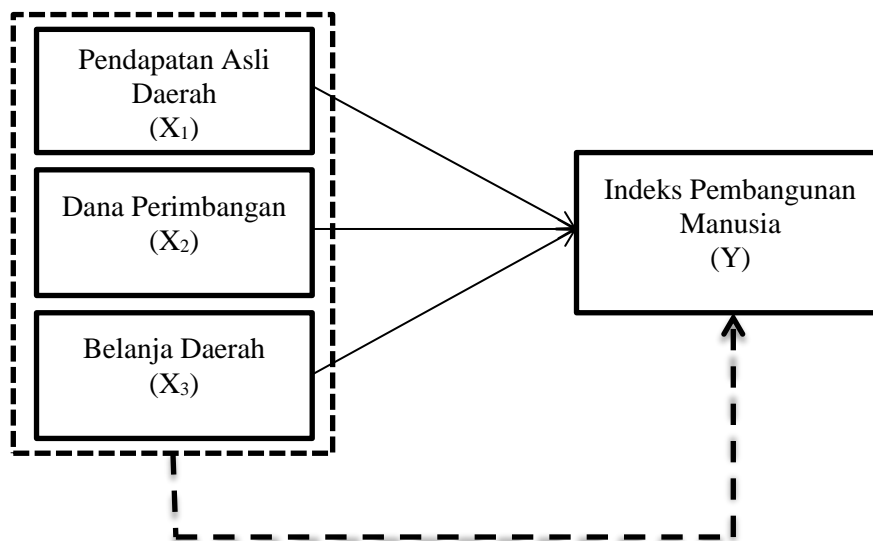
Berkembangnya fungsi-fungsi pemerintah di daerah membuktikan bahwa peranan Pemerintah Propinsi untuk mendorong pembangunan semakin nyata, maka untuk mendukung kegiatannya Pemerintah Propinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan pembangunannya secara sistematis menurut kebutuhannya. Kebijakan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun. Anggaran menjadi suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan pengeluaran dan pengawasan selanjutnya atas pengeluaran-pengeluaran. Dari pendapat diatas dapat diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah tugas pemerintah daerah terkait sesuai dengan anggaran yang dimiliki dan pembuatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam prioritas pembangunan yang dibutuhkan. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang terbaru tentang otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah harus siap mengatur keuangan serta mampu mengali, dan membiayai sendiri segala keperluan dan kegiatan daerahnya. Dana bisa bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, kemudian dilihat pula seberapa pengaruhnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima dari pusat apakah berpengaruh positif dan negatif terhadap indeks kesejahteraan masyarakat provinsi tersebut dan apa dampaknya terhadap tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara tersebut apakah Tingkat Kemandirian Semakin Tinggi atau sebaliknya. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Sumber: Penulis 2021

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Rusiadi & Hidayat, 2013).

Jenis data penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan data statistik dari www.bps.go.id meliputi 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dimulai dari tahun 2018-2019.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 20. Menurut metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda menurut (Sugiyono, 2014) bahwa Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda (Ajija, Shochrul Rohmatul, 2011) akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1.
Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	66	26,54895	31,45328	28,9822	1,2186
DAPER	66	27,73554	31,87346	30,2817	0,8149
BelanjaDaerah	66	21,23090	32,49638	30,6166	1,4512
IPM	66	26,94138	32,00511	30,2389	0,9332
Valid N (listwise)	66				

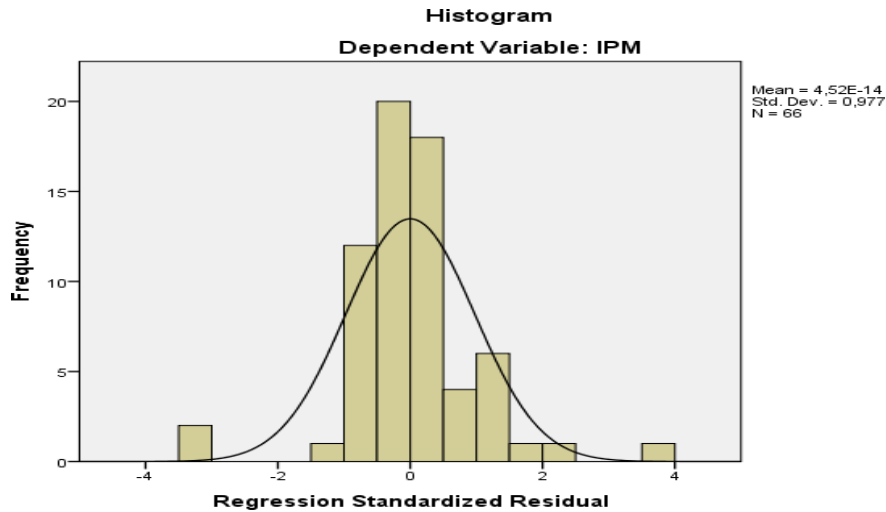
Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel di atas menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian sebanyak 66 sampel, nilai terendah, tertinggi, nilai rata-rata(mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variable pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 26,55 nilai maksimum sebesar 31,45 pada sedangkan, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 28,98 dengan standar deviasi sebesar 1,2186. Pengujian statistik deskriptif variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 27,73 dan nilai maksimum sebesar 31,87 sedangkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,328 dengan standar deviasi 0,8149. Pengujian statistik deskriptif variabel belanja daerah memiliki minimum sebesar 21,23 dan nilai maksimum sebesar 32,50, sedangkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,6422 dengan standar deviasi 1,4512. Pengujian statistik deskriptif variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum sebesar 26,94 dan nilai maksimum sebesar 32,00 sedangkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 30,23 dengan standar deviasi 0,9332.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

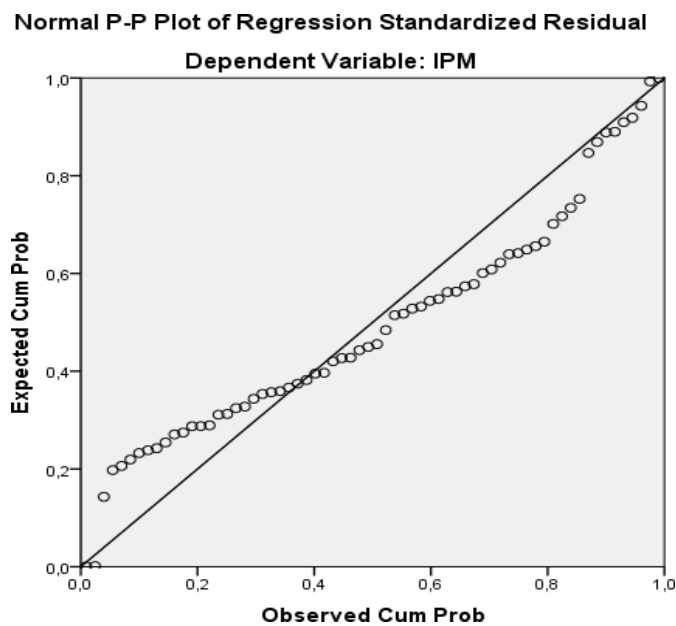
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ajija, Shochrul Rohmatul, 2011). Untuk melihat normalitas residual dilakukan dengan melihat analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal dan normal *probability plot* yang dibandingkan dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.



Gambar 4. Uji Grafik Histogram

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Gambar dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan pola distribusi grafik histogram simetris dan tidak menceng kekiri maupun kekanan.



Gambar 5. Uji Normalitas P-P Plot

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Gambar grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa titik-ptitik menyebar mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya (Widarjono, 2014) tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan dua cara (Supranto, 2009) yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Infaltion Factor*).

Jika $tolerance \leq 0,10$: terjadi gejala multikolonieritas

Jika $tolerance \geq 0,10$: tidak terjadi gejala multikolonieritas

Jika $VIF \geq 10$: terjadi gejala multikolonieritas

Jika $VIF \leq 10$: tidak terjadi gejala multikolonieritas

Tabel 2.
Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	0,576	1,735
	DAPER	0,567	1,763
	Belanja Daerah	0,978	1,022

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel uji multikolonieritas menunjukkan bahwa Variabel pendapatan asli daerah dengan nilai *tolerance* 0,576 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,735 lebih kecil dari 10. Variabel dana perimbangan dengan nilai *tolerance* 0,567 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,763 lebih kecil dari 10. Variabel belanja daerah dengan nilai *tolerance* 0,978 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,022 lebih kecil dari 10.

Karena nilai *tolerance* yang diperoleh untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh untuk setiap variabel lebih kecil dari 10, maka artinya data variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji (Gujarati, 2007) apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menguji nilai *durbin-watson* (DW).

Tabel 3.
Uji Durbin-Watson Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,648

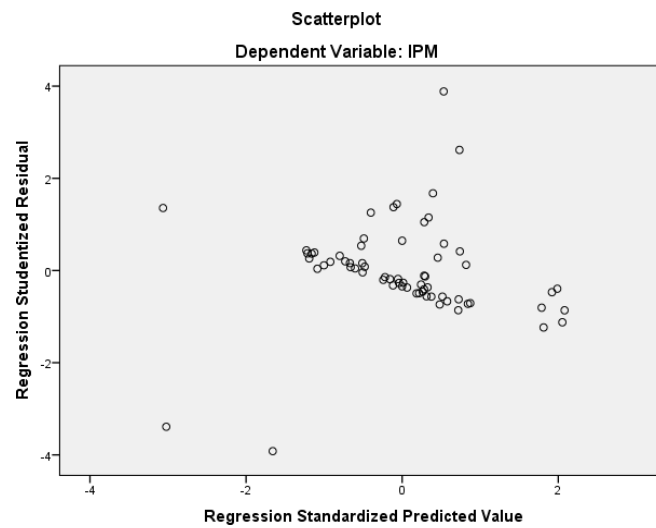
b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan teori menyatakan bahwa untuk menentukan uji ini dapat dipakai menggunakan *durbin watson* yaitu dengan cara melihat $dl < dw < 4-du$, dimana $k=3$ adalah variabel bebas dan $n= 66$ adalah jumlah sampel sehingga dihasilkan bahwa nilai dl sebesar 1,5079, dw sebesar 1,648 dan nilai du sebesar 1,6974 atau $4-1,6974$ adalah sebesar 2,3026 sehingga $1,5079 < 1,648 < 2,3026$ yang diartikan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scaterrplot* dari uji gletser.



Gambar 6. Grafik Scaterrplot
Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Gambar grafik *scaterrplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol (o) pada sumbu Y dan berkumpul disatu tempat, sehingga dari grafik *scatterplot* dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model Penelitian

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis linear berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-3,207	0,878	
1			
PAD	0,189	0,023	0,247
DAPER	0,921	0,035	0,804
BelanjaDaerah	0,002	0,015	0,004

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Olahan, 2021

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 1.4 adalah sebagai berikut:

$$IPM = -3,207 + 0,189_{PAD} + 0,921_{DAPER} + 0,002_{Belanja Daerah} \quad [1]$$

Berdasarkan persamaan model regresi linear berganda di atas, maka dapat diartikan bahwa Nilai Konstanta regresi sebesar -3,207 apabila X_1 , X_2 , X_3 dianggap nol, maka indeks pembangunan manusia adalah sebesar -3,207. Nilai satuan regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,189 X_1 menyatakan bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah satu-satuan, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,189 satuan. Nilai satuan regresi dana perimbangan sebesar 0,921 X_2 menyatakan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan satu-satuan, maka indeks pembanguna manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,921satuan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5.
Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,207	0,878		-3,651	0,001
PAD	0,189	0,023	0,247	8,089	0,000
DAPER	0,921	0,035	0,804	26,132	0,000
BelanjaDaerah	0,002	0,015	0,004	,155	0,878

Dependent Variable: IPM

Sumber: Data Olahan, 2021

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) untuk pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ukuran pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) untuk dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) untuk belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai signifikan $0,878 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya belanja daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia daerah Provinsi Sumatera Utara.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara simultan / bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari persamaan persamaan pertama sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	54,723	3	18,241	599,725	0,000 ^b
Residual	1,886	62	0,030		
Total	56,609	65			

Dependent Variable: IPM

Predictors: (Constant), BelanjaDaerah, PAD, DAPER

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada Tabel 4.8, uji signifikan secara simultan/ uji F menghasilkan F hitung sebesar 599,725 dengan derajat bebas 1 ($df_1 = k-1 = 4-1=3$, dan derajat bebas 4 ($df_3 = n-k = 66-4=62$, dimana n = jumlah sampel, k = jumlah variabel, nilai f tabel pada taraf kepercayaan signifikan 0,05 adalah 2,75 dengan demikian, $F \text{ hitung} = 599,725 > F \text{ tabel} = 2,75$ dengan tingkat signifikan 0,000. Maka H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Koefisien Determinasi

Tabel 7.
Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,983 ^a	0,967	0,965

Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PAD, DAPER
Dependent Variable: IPM
Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,965 atau 96,5%. Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah dan tingkat kemandirian hanya menjelaskan variasi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 96,5% dan sisanya 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berhak diakui pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya. Hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tingginya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang diterima dari pemerintah akan menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi di setiap daerahnya.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah di setiap Provinsi di Indonesia dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang konstruktif dan produktif sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan income yang lebih besar. Dana perimbangan untuk kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah di setiap Provinsi di Indonesia meningkat juga.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian nilai signifikan $0,878 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

Adanya kewenangan yang diberikan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam penyusunan anggaran yang diatur dalam UU No. 32/2004, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan proporsional daerah masing-masing. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik.

SIMPULAN

Setelah melakukan uji data maka Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1). Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (2). Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (3). Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (4). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajija, Shochrul Rohmatul, D. (2011). Cara Cerdas Menguasai Eviews. In Jakarta (1st Ed.). Salemba Empat.
- Bpprd. (2022). Pendapatan Asli Daerah. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi. <https://bpprd.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/pendapatan-asli-daerah#:~:text=Pendapatan Asli Daerah Adalah Hak,Undang-Undang Nomor 23 Tahun>
- Bps. (2021). Sumatera Utara Dalam Angka. Bps Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/publication/2021/02/26/E93c46a1e30092ec491ec8a9/provinsi-sumatera-utara-dalam-angka-2021.html>
- Dalimunthe, D. R. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11695/Skripsi Dhea Ramadhani Dalimunthe.pdf?sequence=1&isallowed=Y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11695/Skripsi%20Dhea%20Ramadhani%20Dalimunthe.pdf?sequence=1&isallowed=Y)
- Darise. (2011). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Ykpn.
- Gujarati, D. N. (2007). Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1 (3rd Ed.). Erlangga. <https://www.belbuk.com/dasardasar-ekonometrika-jilid-1-edisi-3-p-8235.html>
- Kemenkeu Djpk. (2014). Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Keuangan Ri. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Pendapatan-Daerah.pdf>
- Mahmudi. (2010). Pengelolaan Deuangan Daerah Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislatif.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2(1), 30–45. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/22844
- Rahman. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Jeneponto (Perspektif Ekonomi Islam) [Uin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6181/1/Rahman.pdf>
- Rawung, N. (2016). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal Emba, 4(1), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11650/11242>
- Reza, M. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Sumatera Utara Tahun 2012 – 2014 [Universitas Sumatera Utara].
- Rusiadi, R., & Hidayat, R. (2013). Metode Penelitian, Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus Dan Aplikasi Spss, Eviews, Amos Dan Lisrel. Medan: Usu Press.
- Simbolon, R., & Elviani, S. (2017). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Xv(1), 1–18. <https://ideas.repec.org/p/osf/inarxi/8z5vp.html>
- Sugiyono, P. . (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Supranto, J. (2009). Statistik Teori Dan Aplikasi Jilid 1 (7th Ed.). Erlangga.
- Widarjono, A. (2014). Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (1st Ed.). Upp Stim Ykpn Yogyakarta.